

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan isu krusial di berbagai level wilayah. Persoalan ini tidak hanya bertumpu pada rendahnya pendapatan, melainkan juga pada aspek lain yang membatasi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan terbatasnya kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan dasar, pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan ruang partisipasi sosial. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dipahami sebagai persoalan multidimensi yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

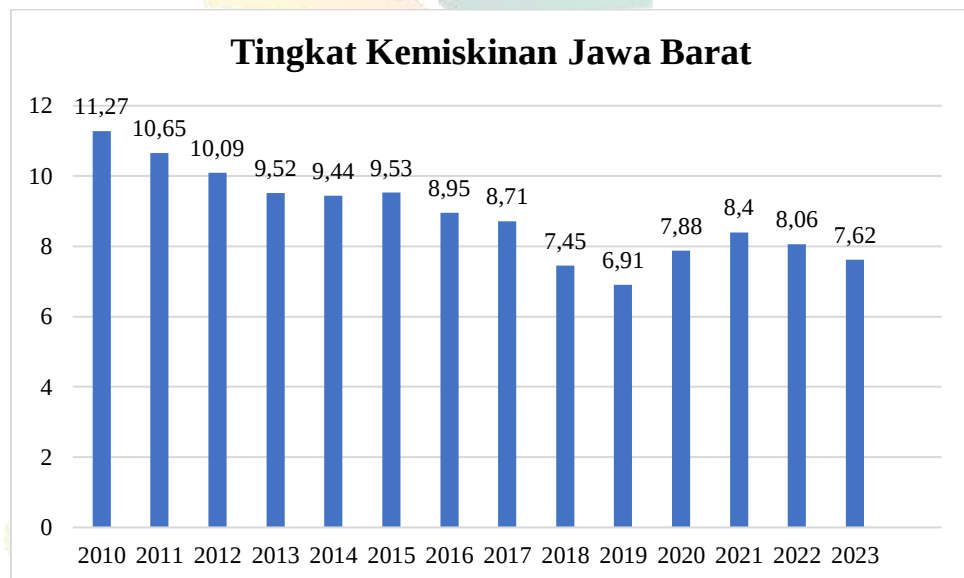
Dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk ditargetkan tercapai di seluruh wilayah pada tahun 2030. Target tersebut menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata menjadi persoalan ekonomi, melainkan juga ukuran penting dalam menilai capaian pembangunan. Jika tidak ditangani secara tepat, kemiskinan dapat menekan produktivitas masyarakat, memperlebar ketimpangan sosial, serta membuat pertumbuhan ekonomi berjalan kurang merata (Wijayanti, 2025).

Indonesia yang statusnya masih menjadi negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam menekan jumlah penduduk miskin. Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan perlindungan sosial dan upaya pengurangan kemiskinan melalui sejumlah program bantuan bagi masyarakat. Kendati demikian, berbagai langkah tersebut belum sepenuhnya mendorong penurunan kemiskinan secara konsisten dan merata pada berbagai daerah di Indonesia.

Merujuk pada data BPS Maret 2023, terdapat sekitar 25,9 juta jiwa di Indonesia yang tergolong miskin, atau setara dengan 9,36% dari total populasi nasional. Walaupun angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tren fluktuatif menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan belum dapat

sepenuhnya ditangani. Di beberapa wilayah, seperti provinsi-provinsi padat penduduk, seperti Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena dinamika sosial-ekonomi yang terjadi di dalamnya cukup kompleks. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dan aktivitas ekonomi yang beragam, mulai dari industri, jasa, hingga sektor pertanian dan perdagangan, Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan. Besarnya jumlah penduduk usia produktif di provinsi ini menjadi potensi sekaligus tantangan tersendiri, terutama dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka tekanan terhadap pasar kerja akan semakin tinggi dan berisiko meningkatkan jumlah pengangguran, yang kemudian turut mendorong meningkatnya angka kemiskinan. Berikut disajikan informasi mengenai kondisi kemiskinan Jawa Barat dalam kurun waktu 2010–2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Grafik 1.1 Data Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023

Dapat dilihat dari grafik 1.1 di atas bahwasannya tren tingkat kemiskinan Jawa Barat dalam rentang tahun 2010 hingga 2023 menunjukkan pola yang

tidak sepenuhnya konsisten. Meski secara umum terdapat penurunan dari angka awal 11,27 persen pada tahun 2010 menjadi 7,62 persen di tahun 2023, pergerakan tahunan menunjukkan beberapa dinamika yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Setelah menurun cukup stabil hingga 2016, pada tahun 2017 dan 2018 tingkat kemiskinan justru kembali meningkat, hingga mencapai 7,45 persen.

Kondisi ini diperparah pada tahun 2020 ketika angka kemiskinan melonjak tajam ke 7,88 persen imbas dari pandemi COVID-19. Namun yang menjadi perhatian adalah fakta bahwa pasca pandemi, pemulihan tren tingkat kemiskinan tidak berlangsung secara optimal. Alih-alih kembali ke tren penurunan yang signifikan, angka kemiskinan justru bertahan di kisaran 7-8 persen selama 3 tahun berturut-turut.

Secara umum, kemiskinan berkaitan dengan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan demografis yang saling berhubungan. Faktor ekonomi meliputi pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum regional (UMR) yang secara langsung terkait dengan daya beli masyarakat dan kesempatan kerja. Ekonomi yang tumbuh tanpa menciptakan lapangan kerja yang cukup membuat orang hidup dalam kemiskinan karena distribusi kekayaan tidak merata.

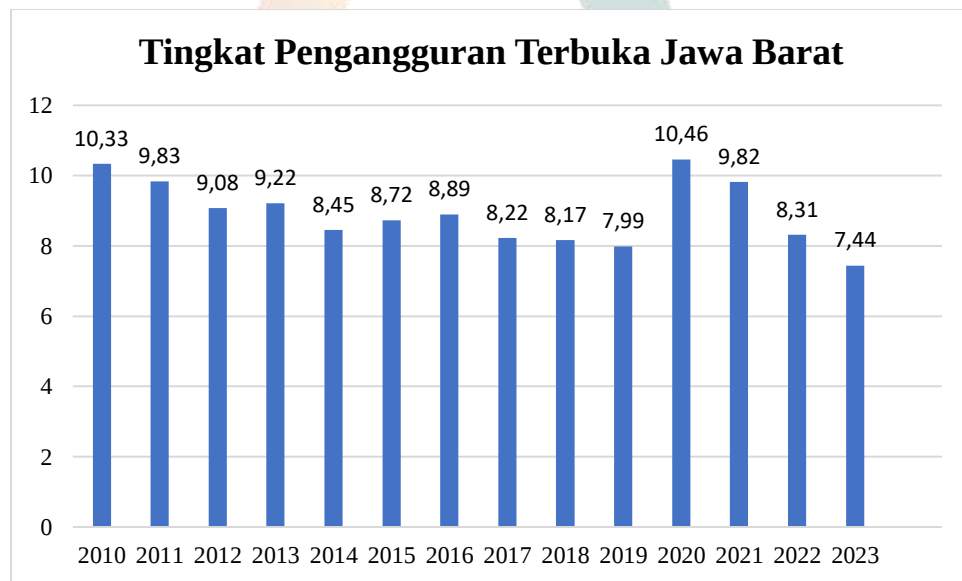
Faktor sosial meliputi tingkat pendidikan, ketersediaan layanan kesehatan, keterampilan profesional dalam bekerja, dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut, yang semuanya menentukan produktivitas individu dan potensi mereka untuk menolak kemiskinan. Sedangkan, faktor demografis meliputi ukuran populasi, proporsi penduduk usia kerja, urbanisasi, dan ketergantungan dalam keluarga juga memengaruhi kemiskinan (Wicaksono & Hutajulu, 2023).

Menurut Andykha (2018), salah satu faktor penting yang berkaitan langsung dengan kemiskinan adalah pengangguran terbuka. Secara teoritis, individu yang menganggur akan kehilangan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut

menjadi salah satu penyebab utama seseorang jatuh ke dalam kemiskinan (Andykha et al., 2018).

Dalam konteks ini, pengangguran terbuka merujuk pada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan meskipun masih mencari kerja (Sari et al., 2024). Persoalan ini muncul ketika jumlah pencari kerja bertambah lebih cepat daripada ketersediaan pekerjaan, sehingga sebagian tenaga kerja belum terserap.

Apabila masalah ini tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat, kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi, dan secara langsung akan meningkatkan kemiskinan di suatu wilayah. Berikut disajikan informasi mengenai kondisi pengangguran terbuka Jawa Barat dalam kurun waktu 2010–2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Grafik 1.2 Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023

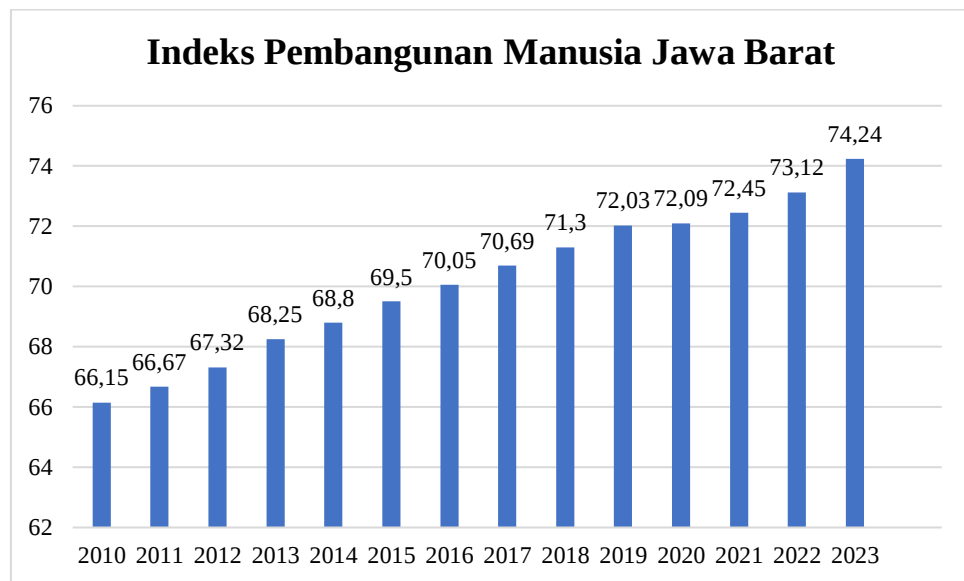
Berdasarkan Grafik 1.2, TPT Jawa Barat selama 2010–2023 bergerak fluktuatif. Pada tahun 2010, TPT tercatat sebesar 10,33 persen, lalu turun hingga mencapai 7,99 persen pada 2018. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh

meningkatnya investasi industri dan pertumbuhan UMKM di beberapa wilayah Jawa Barat.

Namun, tren penurunan tersebut terhenti pada tahun 2020 ketika TPT meningkat tajam menjadi 10,46 persen, sekaligus menjadi angka tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Kenaikan ini merupakan imbas pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas perekonomian dan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja. Walaupun pada periode setelahnya tingkat pengangguran terbuka berkurang menjadi 9,82 persen dan terus turun hingga 7,44 persen pada tahun 2023, pemulihan tersebut berlangsung secara bertahap dan penuh tantangan.

IPM menjadi aspek penting yang berkaitan dengan kemiskinan di Jawa Barat. Melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli, IPM menggambarkan mutu SDM yang dapat memperbesar peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan (Sentani & Yasa, 2024). Semakin baik standar hidup seseorang, semakin besar kesempatan mereka untuk mendapat pekerjaan layak serta memperbaiki kesejahteraan, sehingga jumlah penduduk miskin dapat ditekan.

Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat juga masih belum sepenuhnya tercapai, terutama di beberapa wilayah terpencil. Tidak sedikit anak usia sekolah harus berhenti bersekolah akibat keterbatasan ekonomi, tingginya biaya pendidikan, serta minimnya fasilitas yang tersedia. Variasi regional dalam pembangunan, misalnya antara wilayah metropolitan seperti Kota Bandung dan wilayah yang kurang berkembang seperti Garut atau Kabupaten Sukabumi, adalah beberapa sumber perubahan keseluruhan dalam IPM. Berikut disajikan informasi mengenai kondisi IPM Jawa Barat dalam kurun waktu 2010–2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Grafik 1.3 Data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023

Dapat dilihat dari Grafik 1.3 di atas bahwa tren IPM Jawa Barat dalam rentang tahun 2010 hingga 2023 menunjukkan pola yang cenderung konsisten meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IPM mencapai angka 66,15, kemudian terus meningkat secara berurutan hingga mencapai angka tertinggi di 74,24 pada tahun 2023. Lonjakan paling signifikan terjadi antara tahun 2015 hingga 2020, di mana indeks mengalami pertumbuhan lebih dari 4 poin hanya dalam lima tahun.

Meskipun laju kenaikan IPM sempat melambat selama periode 2020–2021, di mana IPM hanya naik dari 72,09 ke 72,45, namun grafik menunjukkan bahwa pascapandemi, IPM kembali meningkat dengan akselerasi yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memulihkan dan bahkan mempercepat pembangunan manusia di tengah tekanan krisis. Kenaikan IPM ini juga sejalan dengan berbagai kebijakan peningkatan layanan pendidikan, digitalisasi kesehatan, serta perluasan jangkauan bantuan sosial.

Pada dasarnya, IPM memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan (Saputro, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan IPM cenderung menekan risiko kemiskinan pada suatu wilayah. Ini adalah korelasi negatif karena pengembangan aspek IPM yang melibatkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan secara langsung mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga secara struktural dan budaya meminimalkan jumlah penduduk miskin.

Menurut Todaro & Smith, 2020 dalam (Akaakohol & Ijirshar, 2018) peningkatan mutu SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dapat memperkuat produktivitas individu serta turut menekan kemiskinan. Pendidikan, misalnya, berperan dalam memperkuat kemampuan serta kompetensi tenaga kerja, sedangkan kesehatan turut menentukan kapasitas dan produktivitas seseorang dalam bekerja. Adapun ukuran gabungan yang digunakan untuk menilai mutu SDM suatu daerah tercermin melalui IPM, yang dibentuk dari ketiga dimensi tersebut.

IPM relevan ditempatkan sebagai variabel intervening karena memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara pengangguran terbuka dan kemiskinan. IPM mencerminkan mutu SDM dalam tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi namun didukung oleh IPM yang baik, cenderung mampu menghambat peningkatan kemiskinan, karena individu masih memiliki kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Oleh karena itu, IPM dapat berkontribusi pada peran efek tidak langsung antara kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Hasil studi sebelumnya oleh Andykha et al. (2018) yang mengkaji keterkaitan PDRB, pengangguran, IPM, dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, temuan berbeda diperoleh dari studi Ristika et al. (2021) yang membahas keterhubungan jumlah penduduk, pengangguran terbuka, IPM, dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Temuan studi tersebut memperlihatkan bahwa secara parsial

pengangguran terbuka tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Sementara itu, Putri (2025) menemukan bahwa IPM secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Sebaliknya, Amiroh (2022) pada studi tingkat kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017–2021 menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Temuan empiris sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil mengenai hubungan pengangguran terbuka dan kemiskinan. Sebagian penelitian menemukan pengaruh yang signifikan, sedangkan penelitian lain memperoleh hasil sebaliknya. Perbedaan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menguji kembali hubungan langsung antara pengangguran terbuka dan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat selama periode 2010–2023.

Selain itu, menurut tinjauan literatur, penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan, yang tidak dapat sepenuhnya mengeksplorasi dampak tidak langsung pengangguran terbuka terhadap kemiskinan, melalui IPM. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan IPM sebagai variabel intervening untuk menilai perannya dalam menjembatani pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

Pemilihan IPM sebagai variabel mediasi merupakan kontribusi dan menjadi kebaruan dalam penelitian ini, mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji hubungan langsung antara variabel-variabel ini tanpa mempertimbangkan apakah IPM berfungsi sebagai intervening. Dengan demikian, topik penelitian yang dipilih, yaitu “Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Dengan IPM Sebagai Intervening Di Jawa Barat 2010-2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah tersebut, hal yang menjadi dasar kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tren kemiskinan Jawa Barat masih bergerak secara fluktuatif dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten selama periode 2010–2023, meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan.
2. Jumlah penduduk usia produktif di Jawa Barat yang tinggi belum sepenuhnya sejalan dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran terbuka dan memperburuk kemiskinan.
3. Kualitas SDM di Jawa Barat yang ditunjukkan oleh IPM terus membaik, tetapi perbaikan tersebut belum selalu sejalan dengan penurunan kemiskinan secara signifikan.
4. Hasil yang tidak konsisten ditemukan dalam beberapa penelitian sebelumnya terkait pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan, serta belum banyak yang mengkaji IPM sebagai variabel intervening dalam hubungan tersebut.
5. Kajian yang secara khusus menelaah fungsi IPM sebagai mediasi dalam keterkaitan pengangguran terbuka dengan kemiskinan di wilayah Jawa Barat selama periode 2010–2023 masih terbatas.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi analisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan dengan IPM dalam posisi sebagai variabel intervening. Fokus penelitian mencakup Provinsi Jawa Barat selama periode 2010–2023 dengan menggunakan data sekunder *time series* dari publikasi resmi BPS. Variabel yang dianalisis meliputi pengangguran terbuka, IPM, dan kemiskinan.

Untuk menelaah hubungan antarvariabel, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Analisis Jalur (*Path Analysis*). Teknik tersebut digunakan untuk menguji pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan, termasuk peran IPM dalam posisi sebagai variabel intervening. Adapun pengaruh mediasi diuji menggunakan uji Sobel.. Pembatasan tersebut dilakukan agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih terarah, fokus, dan menghasilkan temuan yang relevan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat selama periode 2010–2023?
2. Apakah pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Jawa Barat selama periode 2010–2023?
3. Apakah IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat selama periode 2010–2023?
4. Apakah pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan melalui IPM sebagai variabel intervening di Jawa Barat selama periode 2010–2023?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji pengaruh pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat selama periode 2010–2023.
- b. Untuk mengkaji pengaruh pengangguran terbuka terhadap IPM di Jawa Barat selama periode 2010–2023.
- c. Untuk mengkaji pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Jawa Barat selama periode 2010–2023.
- d. Untuk mengkaji peran IPM sebagai variabel intervening dalam hubungan antara pengangguran terbuka dan kemiskinan di Jawa Barat selama periode 2010–2023.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat teoritis

Hasil kajian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi makro. Selain itu, kajian ini juga dapat dijadikan rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas keterkaitan antara pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan kemiskinan.

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

Kajian ini menjadi media untuk memperluas wawasan dan pemahaman.

2) Bagi dunia akademis

Kajian ini menjadi referensi baru dalam pustaka keilmuan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, khususnya di wilayah universitas.

3) Bagi pemerintah

Hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan.

4) Bagi kajian selanjutnya

Temuan dalam kajian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian sejenis.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditetapkan, sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian tentang latar belakang sebagai dasar pelaksanaan penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menyajikan landasan teoritis sebagai dasar untuk menganalisis variabel penelitian, meliputi konsep dan teori tentang pengangguran terbuka, IPM, serta kemiskinan. Selain itu, bagian ini juga memuat kajian penelitian

terdahulu yang relevan pada bagian literatur review, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode yang diterapkan dalam penelitian, mencakup jenis dan pendekatan, waktu dan lokasi, data beserta sumbernya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel, definisi operasional, serta teknik analisis yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji stasioneritas, analisis jalur (*path analysis*), dan uji koefisien determinasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil pengolahan serta analisis data secara sistematis. Hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel, disertai interpretasi yang berkaitan langsung dengan hipotesis yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang disesuaikan dengan rumusan masalah, serta saran bagi pihak terkait sebagai bentuk kontribusi praktis dari penelitian. Selain itu, saran juga ditujukan sebagai masukan bagi penelitian lanjutan pada bidang yang sama.